



STIE Mahaputra Riau

AMBITEK

Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi

Vol. 2. No. 1 (2022) Hal. 80-100

Internal Control System Analysis of Cash Flow

Didik Riyanto^{1*}, Puja Oktavia², Jefriyanto³

^{1,2}Prodi Akuntansi STIE Pertiwi, Indonesia

³Prodi Akuntansi STIE Mahaputra Riau, Indonesia

*Email: didik.riyanto@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the extent to which the internal control system for cash receipts and disbursements is carried out by the Al-Hafidz DAPM UPK in carrying out its activities in order to achieve its goals. The method used in this research is qualitative research, with flowchart data analysis techniques, namely by pictorial analysis techniques used to explain the procedures that occur briefly and clearly, and descriptively, namely by first collecting data, classifying and interpreting data so that it can provide a clear picture of the problem under study. In collecting data using observation techniques, interviews, questionnaires and documentation, where the data taken is primary data in the form of evidence of records or historical reports that have been arranged in published and unpublished archives. The results of this study indicate that the internal control system for cash receipts and disbursements at UPK DAPM Al-Hafidz has been running well, but is not fully in accordance with the five components of internal control according to COSO theory. Four components are appropriate, namely the control environment, risk assessment, information and communication, and monitoring, while one component, namely control activities, is not appropriate.

Keywords: Internal Control System, Cash Receipts, Cash Disbursements.

Pendahuluan

Salah satu aktiva yang memiliki peranan penting dalam perkembangan perusahaan adalah kas, kas yaitu aset yang paling cair (*liquid*), dalam mengupayakan perlindungan kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mempunyai sistem pengendalian internal dari mulai penerimaan kas sampai penyetorannya ke bank (Manoppo, 2013). Begitu rawannya kas terhadap pencurian dan penyelewengan maka untuk mencegahnya harus diterapkan sistem pengendalian internal yang baik (Nuada, 2013). Pengendalian internal (*internal control*) adalah rencana organisasi dalam menjaga atau melindungi aktiva, untuk mengetahui informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk menaati kebijakan manajemen (Krismiaji, 2015). Dengan adanya penerapan pengendalian internal dalam kegiatan perusahaan diharapkan tidak akan terjadi bentuk penyelewengan atau kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. Apabila suatu perusahaan atau organisasi tidak memiliki sistem pengendalian internal yang baik, maka hal tersebut akan menjadi faktor pendorong masalah penggelapan dan berbagai penyimpangan lain didalam suatu organisasi atau perusahaan (Wakhyudi 2018:12).

Berdasarkan artikel yang dikutip dari akuntansipedia.com menyatakan bahwa *association of certified fraud examiner (ACFE)* dalam *report to the nations on occupational fraud and abuse* melaporkan bahwa kasus



STIE Mahaputra Riau

AMBITEK

Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi

Vol. 2. No. 1 (2022) Hal. 80-100

fraud dan penyalahgunaan yang terjadi pada 2016 mencapai angka 2.410 *fraud* ditempat kerja yang terjadi pada 114 negara diseluruh dunia. *Ernest & young* (EY) yang merupakan salah satu kantor akuntan publik (KAP) *big four* dan *association of certified fraud examiner* (ACFE) pada tahun 2016 melakukan survey mengenai *fraud* dan menemukan fakta bahwa *fraud* yang paling sering terjadi di indonesia adalah korupsi, dengan presentase sebesar 77%, namun *fraud* yang paling merugikan di indonesia merupakan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* atau yang dikenal dengan sebutan KPMG yang merupakan salah satu kantor akuntan publik (KAP) terbesar didunia juga mempublikasikan hasil risetnya pada mei 2016 dan memberikan pernyataan bahwa lemahnya pengendalian internal merupakan masalah besar dan terus berkembang. Riset ini memberikan hasil bahwa 61% faktor yang berkontribusi dalam memfasilitasi *fraud* adalah lemahnya pengendalian internal. Pengendalian internal dikatakan lemah, ketika pengendalian tersebut dirancang dengan buruk dan tidak diikuti oleh karyawan.

Menurut Tuanakotta (2013: 127), Pengendalian internal dirancang, diimplementasi, dan dipelihara oleh *those charged with governance* TCWG, manajemen, dan karyawan lain untuk menangani risiko bisnis dan risiko kecurangan yang diketahui (*identified business and fraud risks*) mengancam pencapaian tujuan entitas. Sedangkan Basri (2018) Berpendapat bahwa sistem pengendalian internal juga dapat digunakan untuk melacak kesalahan yang terjadi agar dapat dikoreksi, sehingga sistem pengendalian internal sangat dibutuhkan oleh setiap entitas, baik yang usahanya berskala besar maupun berskala kecil. Menurut Kumaat (2011:139) Salah satu faktor pemicu dari terjadinya kecurangan tersebut yaitu adanya faktor *opportunity* (kesempatan) yang mengambil keuntungan melalui cara-cara yang merugikan. Kesempatan itu dapat berupa kelemahan yang melat pada sistem pengendalian internal yang terdapat di perusahaan, yaitu proses kerja atau pengorganisasian kerja (*business process*) dengan kondisi antara lain, yang pertama desain pengendalian internal yang kurang tepat, sehingga meninggalkan resiko, kedua praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman (*common business sense*) yang berlaku, ketiga pemantauan (pengendalian) yang tidak konsisten terhadap implementasi *business process*, dan yang terakhir evaluasi yang tidak berjalan terhadap *business proces* yang berlaku. Lemahnya pengendalian internal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya dan maraknya tindakan kecurangan. Pengendalian internal merupakan suatu cara yang berperan sebagai pencegah dan pendeteksi kecurangan yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta sistem teknologi informasi yang ada di perusahaan. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, serta ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku Azhar Susanto (2013:95). Salah satu contoh fenomena mengenai lemahnya sistem pengendalian internal adalah: Pada Bank DKI karena diduga menggelapkan uang sejumlah Rp. 524.000.000,-, mantan asisten administrasi grup *quality assurance* Bank DKI Dedy Hartoyo dipecat dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Masalah ini berawal dari tutup buku Bank DKI pada 31 Desember 2007, berkat adanya pengendalian sistem internal Bank DKI diketahui terdapat uang muka biaya yang belum diselesaikannya.

Dalam IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) I tahun 2013 terdapat 21 obyek pemeriksaan terkait BUMN dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDIT) yang meliputi pelaksanaan, subsidi, kewajiban pelayanan umum (KPU), operasional BUMN, dan pengelolaan pendapatan, biaya, investasi, dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), terdapat 150 kasus penyimpangan, 234 kasus, terkait kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan 276 kasus terkait ketidak patuhan terhadap ketentuan



STIE Mahaputra Riau

AMBITEK

Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi

Vol. 2. No. 1 (2022) Hal. 80-100

perundang-undangan. Dari 510 kasus yang ada, sebanyak 93 kasus merupakan kasus-kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan di BUMN senilai Rp 2,60 triliun. (www.aktual.com)

BPK menemukan temuan yang berulang, seperti kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 56,98 triliun. Dalam semester I tahun 2013 BPK telah memeriksa 579 objek pemeriksaan, dengan rincian 519 objek pemeriksaan laporan keuangan, 9 objek pemeriksaan kinerja dan 69 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari pemeriksaan itu, BPK mengungkapkan sebanyak 13.969 kasus kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap undang undang dengan nilai Rp 56,98 triliun. Jumlah kasus kelemahan SPI sebanyak 5747, sebanyak 2.854 kasus merupakan penyimpangan administrasi dan sebanyak 779 kasus dengan nilai Rp 46,24 triliun merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Sementara itu, sebanyak 4.589 kasus senilai Rp 10,74 triliun merupakan ketidakpatuhan, sehingga mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan. Atas temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi berupa penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/ pemerintah daerah atau perusahaan negara. Dari seluruh temuan BPK tersebut sekitar Rp 372,40 miliar telah disetorkan kembali ke kas negara atas rekomendasi BPK diatas. Jumlah tsb sangat minim ketimbang temuan BPK semester 1 2013. (www.akuntanonline.com) Melalui hasil audit internal, perusahaan Mulyaningrum diadili karena dugaan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjem (KSP) Bina Usaha Makmur, Kantor Kas Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dugaan penggelapan dana kurang lebih Rp 200 juta. Modus operasinya terdakwa memasukan nasabah fiktif melalui pencatutan nama 14 orang, sehingga terjadi kredit macet. (beritajatim.com)

Sistem akuntansi adalah organisasi, formuir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi 2016:3). Menurut Salasa, Saifi, Azizah (2016) sistem akuntansi disebut juga dengan istilah sistem informasi akuntansi yaitu susunan berbagai alat komunikasi, tenaga pelaksanaan, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan. Sedangkan Baridwan (2010:4) Sistem Akuntansi adalah : formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, serta alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditor, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi.

Supriyono (2016:147) pada 1949, komite yang dibentuk oleh American Institute of Accountants (AIA) mendefinisikan pengendalian internal adalah meliputi rencana organisasi dan seluruh metode serta ukuran yang dikoordinasi, yang digunakan dalam suatu bisnis untuk melindungi aset - asetnya, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, mempromosikan efisiensi operasional, dan mendorong ketaatan pada kebijakan manajerial. Definisi tersebut mengakui bahwa "sistem" pengendalian internal adalah lebih luas daripada fungsi departemen akuntansi dan departemen keuangan. Sistem pengendalian internal juga mencakup pemahaman dengan baik aktivitas - aktivitas di bidang lain, misalnya studi gerak dan waktu yang bersifat teknis serta penggunaan pengendalian mutu melalui sistem inspeksi yang pada dasarnya merupakan fungsi produksi. Menurut Krismiaji (2010:285), pengendalian intern untuk transaksi penerimaan kas mencakup "otorisasi terhadap transaksi penerimaan kas, pengamanan terhadap kas atau cheque, pemisahan tugas dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai". Menurut Haryono Jusup (2011:13) kas merupakan aset perusahaan yang siap digunakan untuk diubah menjadi aset lain, misalkan



digunakan untuk membeli persediaan barang, membeli aset tetap (tanah, gedung, mesin dan sebagainya). Kas juga mempunyai sifat yang sangat mudah digelapkan dan disembunyikan. Karena sifatnya yang demikian, kas merupakan aset perusahaan yang sangat rentan terhadap kecurangan. Prosedur pengeluaran kas harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di dalam perusahaan sehingga hanya pengeluaran-pengeluaran yang telah disetujui dan betul-betul untuk kegiatan perusahaan saja yang dicatat dalam pembukuan perusahaan. Unsur-unsur pengendalian internal yang baik dalam pengeluaran kas adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2014: 516-522) : Organisasi, Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan, Praktik yang Sehat, Karyawan yang Berpotensi. Ciri-ciri pengendalian yang baik atas transaksi pengeluaran kas, yaitu: Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pihak berwenang, Pencatatan dalam jurnal harus didasarkan pada bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang, Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, dilakukan melalui dana kas kecil (imprest system)

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:9) dalam buku metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pada penulisan ini, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap sistem penerimaan dan pengeluaran kas di UPK DAPM Al-Hafidz untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan oleh UPK DAPM Al-Hafidz. Penelitian ini ditunjukkan untuk melihat situasi yang ada, yang selanjutnya di analisis dan disimpulkan sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber Data terdiri dari data primer yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi, dalam hal ini keterangan dari pihak penerimaan dan pengeluaran kas di UPK DAPM Al-Hafidz. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) . Data sekunder dapat berupa bukti dokumen, catatan atau laporan historis baik yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan.

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. Adapun prosedur analisis data dalam penelitian ini yaitu : Meninjau sasaran pengendalian intern yaitu unit pengelola kegiatan (UPK) DAPM Al-Hafidz, Mengumpulkan data dan informasi tentang sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan hasil Observasi, wawancara dan kuesioner, Mempelajari dan mengkaji data dan informasi tentang sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas dan menganalisisnya



dari awal, Menguraikan komponen-komponen sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas yang ada pada unit pengelola kegiatan (UPK) DAPM Al-Hafidz. Berdasarkan hasil kuisioner, kemudian membandingkannya dengan teori yang ada, Menarik kesimpulan atas uraian dan penjelasan sesuai dengan keseluruhan hasil proses pengumpulan data dan perbandingan yang dilakukan, sehingga diperoleh sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas pada unit pengelola kegiatan (UPK) DAPM Al-Hafidz. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pengendalian internal UPK DAPM Al-Hafidz jika dibandingkan dengan teori yang ada, maka penulis melakukan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan yang kemudian akan dibandingkan dengan teori yang terdapat dalam buku-buku referensi. Mengenai hal-hal yang akan dibandingkan adalah 5 komponen pengendalian internal yang dikeluarkan oleh COSO, antara lain:

1. Lingkungan Pengendalian.
2. Penilaian Risiko.
3. Informasi dan Komunikasi.
4. Aktivitas Pengendalian, dan
5. Pemantauan

Hasil dan Pembahasan

Analisis perbandingan kesesuaian antara Pengendalian Internal pada Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada UPK DAPM Al-Hafidz dengan Komponen Pengendalian Internal menurut COSO.

Dengan adanya pengendalian internal pada sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada UPK DAPM Al-Hafidz sangatlah penting agar risiko terjadinya *fraud* dan error dalam setiap penerimaan dan pengeluaran kas dapat diperkecil, sehingga kas yang masuk dan kas yang keluar sesuai. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan pengendalian internal pada sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh UPK DAPM Al-Hafidz dengan komponen pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh COSO yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Perbandingan pengendalian internal pada sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada UPK DAPM Al-Hafidz dengan komponen pengendalian menurut COSO.

perbandingan kesesuaian antara pengendalian internal pada sistem penerimaan kas pada UPK DAPM Al-Hafidz dengan komponen pengendalian internal menurut COSO.

Hasil Analisis Pengendalian Internal pada Sistem Penerimaan Kas berdasarkan pengendalian internal COSO pada komponen Lingkungan Pengendalian

Elemen Komponen Lingkungan Pengendalian	Teori	Praktik Pengendalian yang dilaksanakan UPK DAPM Al-Hafidz	Sesuai/ Tidak Sesuai
--	--------------	--	-----------------------------



Struktur Organisasi	Struktur organisasi harus disajikan secara eksplisit dalam bentuk grafis agar jelas siapa bertanggungjawab atas apa.	UPK DAPM Al-Hafidz mempunyai struktur organisasi yang jelas dalam bentuk grafis	Sesuai
Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika	Manajemen harus menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika.	karyawan wajib untuk memberi tahu jika ada pelanggaran lewat forum rapat ada bimbingan moral kepada karyawan yang dilakukan minimal setahun dua kali	Sesuai
peraturan dan kode etik karyawan	Manajemen harus mempunyai peraturan dan kode etik secara tertulis agar karyawan mengetahui aktivitas yang boleh dan aktivitas tidak boleh dilakukan.	UPK DAPM AL-Hafidz sudah memiliki peraturan dan kode etik secara tertulis untuk karyawan	Sesuai
komitmen terhadap kompetensi	Perusahaan harus merekrut karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya guna mendorong kreativitas dan inisiatif dalam menghadapi kondisi yang dinamis saat ini	adanya bimbingan moral kepada karyawan yang dilakukan minimal setahun dua kali	Sesuai
Metode penetapan tanggungjawab dan wewenang	Penetapan otoritas dan tanggung jawab nampak dalam deskripsi pekerjaan (jobdesk), oleh karena itu, penting bagi sebuah organisasi untuk memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas.	UPK DAPM Al-Hafidz mempunyai deskripsi pekerjaan atau jobdesk yang jelas	Sesuai



<p><i>Kebijakan dan praktik untuk mengelola sumber daya manusia (SDM)</i></p>	<p><i>Kegiatan sumber daya manusia meliputi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Pelatihan karyawan</i><i>2. Evaluasi karyawan</i><i>3. Kompensasi karyawan</i><i>4. Konseling karyawan</i><i>5. Memberikan hukuman bagi karyawan yang melakukan kecurangan</i>	<p><i>1. UPK DAPM Al-Hafidz melaksanakan pelatihan atau training bagi karyawan baru selama 6 bulan</i></p>	<p><i>Sesuai</i></p>
		<p><i>2. UPK DAPM Al-Hafidz melaksanakan evaluasi bagi karyawan lewat forum rapat</i></p>	<p><i>Sesuai</i></p>
		<p><i>3. UPK DAPM Al-Hafidz memberikan kompensasi tiap bulan bagi karyawan, jumlah kompensasi akan dirapatkan di forum rapat sesuai dengan pekerjaannya</i></p>	<p><i>Sesuai</i></p>
		<p><i>4. UPK DAPM Al-Hafidz membuka konseling bagi karyawan yang menemui masalah dan berusaha membantu dengan semaksimal mungkin</i></p>	<p><i>Sesuai</i></p>
		<p><i>5. UPK DAPM Al-Hafidz memberikan hukuman secara tegas bagi karyawan yang melakukan fraud</i></p>	<p><i>Sesuai</i></p>



Hasil Analisis Pengendalian Internal pada Sistem Penerimaan Kas berdasarkan pengendalian internal COSO pada komponen Penilaian Risiko

Elemen Komponen Penilaian Risiko	Teori	Praktik Pengendalian yang dilaksanakan UPK DAPM Al-Hafidz	Sesuai/Tidak Sesuai
<i>Personel baru</i>	<i>Personel baru yang memiliki pemahaman berbeda atau tidak memadai atas pengendalian internal</i>	<i>UPK DAPM Al-Hafidz melaksanakan pelatihan dan orientasi bagi karyawan baru selama enam bulan</i>	<i>Sesuai</i>
<i>Sistem Informasi (SI) dan teknologi baru</i>	<i>Sistem informasi (SI) dan teknologi yang baru atau yang diperbaharui mempengaruhi pemrosesan transaksi</i>	<i>UPK DAPM Al-Hafidz melaksanakan pelatihan kepada karyawan sebelum mengimplementasikan sistem komputer agar karyawan bisa mengoperasikan sistem informasi tersebut.</i>	<i>Sesuai</i>
<i>Produk dan aktivitas baru</i>	<i>produk dan aktivitas baru yang tidak dimengerti oleh karyawan akan menimbulkan resiko terganggunya proses bisnis perusahaan</i>	<i>UPK DAPM Al-Hafidz selalu melakukan sosialisasi kepada karyawan jika ada produk atau aktivitas baru</i>	<i>Sesuai</i>
<i>Bencana alam atau kerusuhan politik</i>	<i>bencana alam atau kerusuhan politik, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami, angin ribut, perang atau kerusuhan masa.</i>	<i>UPK DAPM Al-Hafidz setiap hari melakukan back-up data ke kantor di USD</i>	<i>Sesuai</i>

Hasil Analisis Pengendalian Internal pada Sistem Penerimaan Kas berdasarkan pengendalian internal COSO pada komponen Aktivitas Pengendalian

Elemen Komponen Aktivitas Pengendalian	Teori	Praktik Pengendalian yang dilaksanakan UPK DAPM Al-Hafidz	Sesuai/Tidak Sesuai
---	--------------	--	----------------------------



Desain dokumen yang baik dan bernomor urut tercetak	Desain dokumen yang baik adalah desain dokumen yang sederhana sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahan mengisi. Dokumen juga harus memuat tempat untuk tanda tangan bagi mereka yang berwenang untuk mengotorisasi transaksi. Jika dokumen digunakan sebagai bukti peralihan harta, maka perlu ada kolom untuk tanda tangan dan nama terang penerima. Dokumen perlu bernomor urut cetak sebagai wujud pertanggung jawaban penggunaan dokumen.	UPK DAPM menggunakan dokumen bukti penerimaan angsuran (BPA), dan slip memo sederhana yang mudah digunakan	Sesuai
		Dokumen bukti penerimaan angsuran (BPA), dan slip memo menyediakan tempat untuk tanda tangan	Sesuai
		Dokumen bukti penerimaan angsuran (BPA), dan slip memo bernomor urut cetak	Sesuai
Pemisahan Tugas	Terdapat tiga pekerjaan yang harus dipisahkan agar karyawan tidak memiliki peluang untuk mencuri harta perusahaan dan memalsukan catatan akuntansi. Ketiga pekerjaan tersebut adalah fungsi penyimpanan harta, fungsi pencatat, dan fungsi otorisasi.	ada pemisahan tugas antara pemegang kas dan bagian pencatatan	Sesuai
		ada pemisahan tugas antara pemegang kas dan bagian otorisasi	Sesuai
		ada pemisahan tugas antara bagian pencatatan dan bagian otorisasi	Sesuai
Otorisasi yang memadai atas transaksi bisnis	Otorisasi adalah pemberian wewenang dari manajer kepada bawahannya untuk melakukan aktivitas atau untuk mengambil keputusan tertentu. Otorisasi ini diwujudkan dalam bentuk tanda	adanya tanda tangan pihak yang berwenang di dokumen bukti penerimaan angsuran (BPA), dan slip memo	Sesuai



	<i>tangan atau paraf dalam dokumen transaksi.</i>		
<i>mengamankan harta dan catatan perusahaan</i>	<p><i>Ketika orang berpikir tentang aset, mereka sering kali berpikir tentang kas dan aset fisik seperti persediaan dan perlengkapan. Akan tetapi dimasa sekarang ini, informasi atau catatan perusahaan juga merupakan salah satu aset penting bagi perusahaan. Yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengamankan harta dan informasi tersebut, antara lain meliputi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Membatasi akses fisik terhadap harta (seperti penggunaan register kas, kotak brankas, dan lain sebagainya).</i> <i>2. Menjaga catatan dan dokumen dengan menyimpan catatan dan dokumen dalam lemari yang terkunci, serta dengan membuat back-up yang memadai.</i> <i>3. Pembatasan akses terhadap ruang komputer dan terhadap file perusahaan.</i> 	<i>hanya pihak tertentu saja yang bisa mengecek kas. Cash in bank hanya bisa diakses oleh finance manager, sedangkan cash in hand dapat diakses oleh bendahara / kasir</i>	<i>Sesuai</i>
		<i>UPK DAPM Al-Hafidz tidak menyimpan cash in hand, biasanya langsung melakukan penyetoran ke bank</i>	<i>Sesuai</i>
		<i>catatan dan dokumen disimpan dalam lemari yang terkunci</i>	<i>Sesuai</i>
		<i>adanya pembatasan akses terhadap komputer dan file UPK DAPM Al-Hafidz, yang boleh mengakses yaitu pihak UPK DAPM Al-Hafidz sendiri</i>	<i>Sesuai</i>
		<i>adanya ID dan password serta firewall dalam setiap komputer di UPK DAPM Al-Hafidz</i>	<i>Sesuai</i>
<i>Menciptakan adanya pengecekan independen atas pekerjaan karyawan lain</i>	<p><i>Beragam aktivitas untuk pengecekan independen antara lain meliputi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Membandingkan catatan dengan aktual fisik. Misalnya, perusahaan</i> 	<i>UPK DAPM Al-Hafidz melakukan rekap BPA tiap sore sebelum kantor tutup dan membandingkannya dengan kas yang sebenarnya dimiliki</i>	<i>Sesuai</i>



	<p>dapat membandingkan antara catatan persediaan dengan saldo persediaan yang benar-benar ada.</p> <p>2. Prinsip double entry bookkeeping. Prinsip bahwa total debit akan sama dengan total kredit merupakan salah satu sarana pengecekan.</p> <p>3. Menciptakan adanya review atau pengecekan independen . contohnya, adalah laporan keuangan perusahaan diaudit oleh auditor independen.</p>	<p>UPK DAPM Al-Hafidz menggunakan prinsip double entry bookkeeping dalam pembuatan jurnal dan laporan keuangan yang secara otomatis yang dibuat dalam sistem komputer</p>	<p>Sesuai</p>
		<p>laporan keuangan UPK DAPM Al-Hafidz tidak diaudit oleh auditor independen</p>	<p>tidak sesuai</p>

Hasil Analisis Pengendalian Internal pada Sistem Penerimaan Kas berdasarkan pengendalian internal COSO pada komponen Informasi dan Komunikasi

Elemen Komponen Informasi dan Komunikasi	Teori	Praktik Pengendalian yang dilaksanakan UPK DAPM Al-Hafidz	Sesuai/Tidak Sesuai
<p>Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid</p>	<p>Pengusaha harus mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid. Misalnya perusahaan harus mencatat semua pengeluaran dan penerimaan kas dalam suatu periode. Jika ada pengeluaran dan penerimaan kas yang tidak tercatat akan mengakibatkan ketidaksesuaian antara kas dalam catatan perusahaan dengan kas yang sebenarnya dimiliki perusahaan.</p>	<p>transaksi penerimaan kas akan dicatat dalam bukti penerimaan angsuran (BPA)</p>	<p>Sesuai</p>



Mengklasifikasi transaksi sebagaimana seharusnya	Perusahaan harus mengklasifikasi transaksi sebagaimana seharusnya agar pencatatan transaksi menjadi tepat. Misalnya apabila pengeluaran kas diklasifikasikan secara tidak tepat sebagai aset, maka aset dan pemasukan bersih dinyatakan terlalu berlebihan.	penerimaan kas akan diklasifikasikan sebagai aktiva	Sesuai
mencatat transaksi pada periode akuntansi yang tepat	Perusahaan harus mencatat transaksi pada periode akuntansi yang tepat agar keterangan tanggal dicatat tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan	keterangan tanggal ditransaksi dokumen BPA, dan slip memo dicatat sesuai dengan waktu transaksi dan tidak bisa dimanipulasi karena slip akan diberi tanda dengan stempel.	Sesuai
Menyajikan transaksi dan mengungkapkan terkait dalam laporan keuangan secara tepat	Perusahaan harus menyajikan transaksi dan pengungkapan terakhir dalam laporan keuangan secara tepat agar laporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diandalkan	transaksi dalam sistem komputer akan tepat karena didukung oleh bukti. Laporan keuangan juga akan tepat karena slip diberi tanda stempel jadi memperkecil human error	Sesuai

Hasil Analisis Pengendalian Internal pada Sistem Penerimaan Kas berdasarkan pengendalian internal COSO pada komponen Pemantauan

Elemen Komponen Pemantauan	Teori	Praktik Pengendalian yang dilaksanakan UPK DAPM Al-Hafidz	Sesuai/Tidak Sesuai
Supervisi yang efektif	Supervisi yang efektif meliputi monitor kinerja karyawan serta mengamankan harta dengan mengawasi karyawan yang memiliki akses terhadap harta perusahaan. Supervisi sangat penting, terutama di perusahaan kecil yang tidak memiliki pemisahan tugas yang cukup memadai.	secara periodik dilakukan evaluasi kinerja bagian penerimaan, dan pengelolaan kas dalam forum rapat akhir tahun (RAT)	Sesuai



Pengauditan internal	Pengendalian internal meliputi : 1. Evaluasi kepatuhan karyawan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen, dan terhadap aturan atau regulasi yang berlaku. 2. Evaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi manajemen.	secara periodik UPK DAPM Al-Hafidz melakukan evaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi manajemen lewat forum rapat akhir tahun (RAT)	Sesuai
----------------------	--	--	--------

Pengendalian Internal pada Sistem Pengeluaran Kas pada UPK DAPM Al-Hafidz dengan Komponen Pengendalian Internal Menurut COSO

Hasil Analisis Pengendalian Internal pada Sistem Pengeluaran Kas berdasarkan pengendalian internal COSO pada komponen Lingkungan Pengendalian

Elemen Komponen Lingkungan Pengendalian	Teori	Praktik Pengendalian yang dilaksanakan UPK DAPM Al-Hafidz	Sesuai/Tidak Sesuai
Struktur Organisasi	Struktur organisasi harus disajikan secara eksplisit dalam bentuk grafis agar jelas siapa bertanggungjawab atas apa.	UPK DAPM Al-Hafidz mempunyai struktur organisasi yang jelas dalam bentuk grafis	Sesuai
Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika	Manajemen harus menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika.	karyawan wajib untuk memberi tahu jika ada pelanggaran lewat forum rapat ada bimbingan moral kepada karyawan yang dilakukan minimal setahun dua kali	Sesuai
peraturan dan kode etik karyawan	Manajemen harus mempunyai peraturan dan kode etik secara tertulis	UPK DAPM AL-Hafidz sudah memiliki peraturan	Sesuai



	agar karyawan mengetahui aktivitas yang boleh dan aktivitas tidak boleh dilakukan.	dan kode etik secara tertulis untuk karyawan	
komitmen pterhadap kompetensi	Perusahaan harus merekrut karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya guna mendorong kreativitas dan inisiatif dalam menghadapi kondisi yang dinamis saat ini	adanya bimbingan moral kepada karyawan yang minimal dilakukan minimal setahun dua kali	Sesuai
Metode penetapan tanggungjawab dan wewenang	Penetapan otoritas dan tanggung jawab nampak dalam deskripsi pekerjaan (jobdesk), oleh karena itu, penting bagi sebuah organisasi untuk memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas.	UPK DAPM Al-Hafidz mempunyai deskripsi pekerjaan atau jobdesk yang jelas	Sesuai
Kebijakan dan praktik untuk mengelola sumber daya manusia (SDM)	Kegiatan sumber daya manusia meliputi : 1. Pelatihan karyawan 2. Evaluasi karyawan 3. Kompensasi karyawan 4. Konseling karyawan 5. Memberikan hukuman bagi karyawan yang melakukan kecurangan	1. UPK DAPM Al-Hafidz melaksanakan pelatihan atau traning bagi karyawan baru selama 6 bulan	Sesuai
		2. UPK DAPM Al-Hafidz melaksanakan evaluasi bagi karyawan lewat forum rapat	Sesuai



		3. UPK DAPM Al-Hafidz memberikan kompensasi tiap bulan bagi karyawan, jumlah kompensasi akan dirapatkan di forum rapat sesuai dengan pekerjaannya	Sesuai
		4. UPK DAPM Al-Hafidz membuka konseling bagi karyawan yang menemui masalah dan berusaha membantu dengan semaksimal mungkin	Sesuai
		5. UPK DAPM Al-Hafidz memberikan hukuman secara tegas bagi karyawan yang melakukan fraud	Sesuai

Hasil Analisis Pengendalian Internal pada Sistem Pengeluaran Kas berdasarkan pengendalian internal COSO pada komponen Penilaian Risiko

Elemen Komponen Penilaian Risiko	Teori	Praktik Pengendalian yang dilaksanakan UPK DAPM Al-Hafidz	Sesuai/Tidak Sesuai
Personel baru	Personel baru yang memiliki pemahaman berbeda atau tidak memadai atas pengendalian internal	UPK DAPM Al-Hafidz melaksanakan pelatihan dan orientasi bagi karyawan baru selama enam bulan	Sesuai



<i>Sistem Informasi (SI) dan teknologi baru</i>	<i>Sistem informasi (SI) dan teknologi yang baru atau yang diperbaharui mempengaruhi pemrosesan transaksi</i>	<i>UPK DAPM Al-Hafidz melaksanakan pelatihan kepada karyawan sebelum mengimplementasikan sistem komputer agar karyawan bisa mengoperasikan sistem informasi tersebut.</i>	<i>Sesuai</i>
<i>Produk dan aktivitas baru</i>	<i>produk dan aktivitas baru yang tidak dimengerti oleh karyawan akan menimbulkan resiko terganggunya proses bisnis perusahaan</i>	<i>UPK DAPM Al-Hafidz selalu melakukan sosialisasi kepada karyawan jika ada produk atau aktivitas baru</i>	<i>Sesuai</i>
<i>Bencana alam atau kerusuhan politik</i>	<i>bencana alam atau kerusuhan politik, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami, angin ribut, perang atau kerusuhan masa.</i>	<i>UPK DAPM Al-Hafidz setiap hari melakukan back-up data ke kantor di USD</i>	<i>Sesuai</i>

Hasil Analisis Pengendalian Internal pada Sistem Pengeluaran Kas berdasarkan pengendalian internal COSO pada komponen Aktivitas Pengendalian

Elemen Komponen Aktivitas Pengendalian	Teori	Praktik Pengendalian yang dilaksanakan UPK DAPM Al-Hafidz	Sesuai/Tidak Sesuai
<i>Desain dokumen yang baik dan bernomor urut tercetak</i>	<i>Desain dokumen yang baik adalah desain dokumen yang sederhana sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahan mengisi. Dokumen juga harus memuat tempat untuk tanda tangan bagi mereka yang berwenang untuk mengotorisasi transaksi. Jika dokumen digunakan sebagai bukti peralihan harta, maka perlu ada kolom untuk</i>	<i>Dokumen bukti keluar kas (BKK), dan slip memo sederhana dan mudah digunakan</i>	<i>Sesuai</i>
		<i>Dokumen bukti keluar kas (BKK), dan slip memo menyediakan tempat untuk tanda tangan</i>	<i>Sesuai</i>



	<i>tanda tangan dan nama terang penerima. Dokumen perlu bernomor urut cetak sebagai wujud pertanggung jawaban menggunakan dokumen.</i>	<i>Dokumen bukti keluar kas (BKK), dan slip memo bernomor urut cetak</i>	<i>Sesuai</i>
<i>Pemisahan Tugas</i>	<i>Terdapat tiga pekerjaan yang harus dipisahkan agar karyawan tidak memiliki peluang untuk mencuri harta perusahaan dan memalsukan catatan akuntansi. Ketiga pekerjaan tersebut adalah fungsi penyimpanan harta, fungsi pencatat, dan fungsi otorisasi.</i>	<i>ada pemisahan tugas antara pemegang kas dan bagian pencatatan</i>	<i>Sesuai</i>
		<i>ada pemisahan tugas antara pemegang kas dan bagian otorisasi</i>	<i>Sesuai</i>
		<i>ada pemisahan tugas antara bagian pencatatan dan bagian otorisasi</i>	<i>Sesuai</i>
<i>Otorisasi yang memadai atas transaksi bisnis</i>	<i>Otorisasi adalah pemberian wewenang dari manajer kepada bawahannya untuk melakukan aktivitas atau untuk mengambil keputusan tertentu. Otorisasi ini diwujudkan dalam bentuk tanda tangan atau paraf dalam dokumen transaksi.</i>	<i>adanya tanda tangan pihak yang berwenang di dokumen bukti keluar kas (BKK), dan slip memo</i>	<i>Sesuai</i>
<i>mengamankan harta dan catatan perusahaan</i>	<i>Ketika orang berpikir tentang aset, mereka sering kali berpikir tentang kas dan aset fisik seperti persediaan dan perlengkapan. Akan tetapi dimasa sekarang ini, informasi atau catatan perusahaan juga merupakan salah satu aset penting bagi perusahaan. Yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengamankan harta dan informasi tersebut, antara lain meliputi :</i> <i>1. Membatasi akses fisik terhadap harta (seperti penggunaan register kas, kotak brankas, dan lain sebagainya).</i> <i>2. Menjaga catatan dan</i>	<i>hanya pihak tertentu saja yang bisa mengecek kas. Cash in bank hanya bisa diakses oleh finance manager, sedangkan cash in hand dapat diakses oleh bendahara/kasir</i>	<i>Sesuai</i>
		<i>UPK DAPM Al-Hafidz tidak menyimpan cash in hand, biasanya langsung melakukan penyetoran ke bank</i>	<i>Sesuai</i>
		<i>catatan dan dokumen disimpan dalam lemari yang terkunci</i>	<i>Sesuai</i>
		<i>adanya pembatasan akses terhadap komputer dan file UPK DAPM Al-Hafidz, yang boleh mengakses yaitu</i>	<i>Sesuai</i>



	<p>dokumen dengan menyimpan catatan dan dokumen dalam lemari yang terkunci, serta dengan membuat back-up yang memadai.</p> <p>3. Pembatasan akses terhadap ruang komputer dan terhadap file perusahaan.</p>	<p>pihak UPK DAPM Al-Hafidz sendiri</p>	
		<p>adanya ID dan password serta firewall dalam setiap komputer di UPK DAPM Al-Hafidz</p>	Sesuai
<p>Menciptakan adanya pengecekan independen atas pekerjaan karyawan lain</p>	<p>Beragam aktivitas untuk pengecekan independen antara lain meliputi :</p> <p>1. Membandingkan catatan dengan aktual fisik. Misalnya, perusahaan dapat membandingkan antara catatan persediaan dengan saldo persediaan yang benar-benar ada.</p> <p>2. Prinsip double entry bookkeeping. Prinsip bahwa total debit akan sama dengan total kredit merupakan salah satu sarana pengecekan.</p> <p>3. Menciptakan adanya review atau pengecekan independen . contohnya, adalah laporan keuangan perusahaan diaudit oleh auditor independen.</p>	<p>UPK DAPM Al-Hafidz melakukan rekap BKK dan membandingkannya dengan kas yang sebenarnya dimiliki</p>	Sesuai
		<p>UPK DAPM Al-Hafidz menggunakan prinsip double entry bookkeeping dalam pembuatan jurnal dan laporan keuangan yang secara otomatis yang dibuat dalam sistem komputer</p>	Sesuai
		<p>laporan keuangan UPK DAPM Al-Hafidz tidak diaudit oleh auditor independen</p>	tidak sesuai

Hasil Analisis Pengendalian Internal pada Sistem Pengeluaran Kas berdasarkan pengendalian internal COSO pada komponen Informasi dan Komunikasi

Elemen Komponen Informasi dan Komunikasi	Teori	Praktik Pengendalian yang dilaksanakan UPK DAPM Al-Hafidz	Sesuai/Tidak Sesuai
--	-------	---	---------------------



<i>Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid</i>	<i>Pengusaha harus mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid. Misalnya perusahaan harus mencatat semua pengeluaran dan penerimaan kas dalam suatu periode. Jika ada pengeluaran dan penerimaan kas yang tidak tercatat akan mengakibatkan ketidaksesuaian antara kas dalam catatan perusahaan dengan kas yang sebenarnya dimiliki perusahaan.</i>	<i>transaksi pengeluaran kas dicatat dalam BKK</i>	<i>Sesuai</i>
<i>Mengklasifikasi transaksi sebagaimana seharusnya</i>	<i>Perusahaan harus mengklasifikasi transaksi sebagaimana seharusnya agar pencatatan transaksi menjadi tepat. Misalnya apabila pengeluaran kas diklasifikasikan secara tidak tepat sebagai aset, maka aset dan pemasukan bersih dinyatakan terlalu berlebihan.</i>	<i>pengeluaran kas akan diklasifikasikan sebagai pengurang aktiva</i>	<i>Sesuai</i>
<i>mencatat transaksi pada periode akuntansi yang tepat</i>	<i>Perusahaan harus mencatat transaksi pada periode akuntansi yang tepat agar keterangan tanggal dicatat tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan</i>	<i>keterangan tanggal ditransaksi dokumen BKK, dan slip memo dicatat sesuai dengan waktu transaksi dan tidak bisa dimanipulasi karena slip akan diberi tanda dengan stempel.</i>	<i>Sesuai</i>
<i>Menyajikan transaksi dan mengungkapkan terkait dalam laporan keuangan secara tepat</i>	<i>Perusahaan harus menyajikan transaksi dan pengungkapan terakhir dalam laporan keuangan secara tepat agar laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diandalkan</i>	<i>transaksi dalam sistem komputer akan tepat karna didukung oleh bukti. Laporan keuangan juga akan tepat karena slip diberi tanda stempel jadi memperkecil human error</i>	<i>Sesuai</i>

Hasil Analisis Pengendalian Internal pada Sistem Pengeluaran Kas berdasarkan pengendalian internal COSO pada komponen Pemantauan



Elemen Komponen Pemantauan	Teori	Praktik Pengendalian yang dilaksanakan UPK DAPM Al-Hafidz	Sesuai/Tidak Sesuai
<i>Supervisi yang efektif</i>	<i>Supervisi yang efektif meliputi monitor kinerja karyawan serta mengamankan harta dengan mengawasi karyawan yang memiliki akses terhadap harta perusahaan. Supervisi sangat penting, terutama di perusahaan kecil yang tidak memiliki pemisahan tugas yang cukup memadai.</i>	<i>secara periodik dilakukan evaluasi kinerja bagian pengeluaran dan pengelolaan kas dalam forum rapat akhir tahun (RAT)</i>	<i>Sesuai</i>
<i>Pengauditan internal</i>	<i>Pengendalian internal meliputi : 1. Evaluasi kepatuhan karyawan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen, dan terhadap aturan atau regulasi yang berlaku. 2. Evaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi manajemen.</i>	<i>secara periodik UPK DAPM Al-Hafidz melakukan evaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi manajemen lewat forum rapat akhir tahun (RAT)</i>	<i>Sesuai</i>

Simpulan

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas pada UPK DAPM Al-Hafidz, berdasarkan hasil analisa serta pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas pada UPK DAPM Al-Hafidz sudah berjalan dengan baik, akan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan lima komponen pengendalian internal menurut teori COSO. Empat komponen telah sesuai, komponen tersebut Lingkungan Pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, Sedangkan satu komponen yaitu aktivitas pengendalian tidak sesuai.

Daftar Pustaka

- Andriyanto Adi Nugroho. 2017. *Analisis Pengendalian Internal pada Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Koperasi Credit Union Sandya Swadaya Yogyakarta.*
- Agoes, Sukrisno. 2016. *Auditing.* Salemba Empat, Jakarta.



STIE Mahaputra Riau

AMBITEK

Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi

Vol. 2. No. 1 (2022) Hal. 80-100

- Caesar Piet Sumurung, Mario. 2015. *Analisis Sistem Pengendalian Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Manado Media Grafika.*
- COSO. (2013). *Internal Control – Integrated Framework.* <https://www.coso.org/>
- Fitri Hartono. 2013. *Evaluasi sistem pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Nasmoco Bengawan Motor Solo Baru.*
- Halim, A., & M.S. Kusufi 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik 2.* Jakarta: Salemba Empat.
- Hardi Bahar. 2018. *Evaluasi pengendalian internal dalam pengelolaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada pelaku UMKM di kota Batam.*
- John Wiley & Sons, Inc. 2015. *Internal Control Audit and Compliance, Documentation and testing under the new COSO framework.*
- Marchell Tandri. 2015. *Efektifitas penerapan sistem pengendalian terhadap penerimaan dan pengeluaran kas di RSU Pancaran Kasih GMIM.*
- Margaretha Manoppo, Rannita. 2013. *Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. Sinar Galesong Prima Cabang Manado.* Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 1007-1015. ISSN 2303-1174.
- Margaretha. 2019. *Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Multi Prima Mandiri Sukses.* Jurnal Ilmu Manajemen Ilmu Terapan (Vol.1 No.1 September 2019).
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi.* Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2014. *Auditing Edisi 6 Buku 1.* Jakarta : Salemba Empat
- Pradana, Kadek Arya dan Erni Sulindawati, Ni Luh Gede. 2017. *Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Seririt.* E-jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No. 2 Tahun 2017).
- Saragih, Vicky Fiara Rizky. 2018. *Analisis sistem pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur Cabang Medan.*
- Siti Nurhasanah. 2018. *Analisis Penerapan Pengendalian Internal penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Buran Nusa Respati.*
- Sugiyono, *Metode Penelitian, Cetakan ke-23, Alfabeta, Bandung, 2016.* Hal 334.
- Soemarso. 2010. *Pengantar Akuntansi.* Salemba Empat, Jakarta.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Sistem Akuntansi.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Widjajanto, Nugroho. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi.* Jakarta. Erlangga, PT Gelora Aksara Pratama.